

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. dr. Soetomo no.1 Slawi, telp. (0283) 491116, fax. (0283) 491289
Website : BKPSDM.tegalkab.go.id; email: BKPSDM@tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan Ridha-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renja BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Kami menyadari bahwa lingkungan strategis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal akan selalu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pemangku kepentingan sangat kami harapkan, sehingga Renja ini dapat secara efektif menjadi medium bagi peningkatan kinerja pembangunan kepegawaian dan perwujudan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Slawi, Agustus 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal



MUIAHIDIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19690619 199003 1 003

DAFTAR ISI

Contents

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSAAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM KABUPATEN TEGAL	42
3.1. Telaahan, terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	43
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
4.1. Rencana Kerja	50
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	62
BAB V PENUTUP	63
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam tataran implementasi amanat tersebut, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini merupakan kewajiban bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan/subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tegal yang disusun berpedoman kepada Renstra BKPSDM Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023. Renja BKPSDM Kabupaten Tegal merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia". Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Renja antara lain: (1) program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai pengelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. (2) adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. (3) program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. dan (4) adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2023 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tegal tahun 2023 sebagai dokumen resmi perencanaan daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 periode tahun Keempat 2023;
2. Sebagai arah bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2023;
3. Sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2023;
4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2023;
5. Sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2023;
6. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di BKPSDM Kabupaten Tegal pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi : Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dalam asumsi satu periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja utama perangkat daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai rencana kerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja dan target yang hendak dicapai pada tahun 2023, serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Seuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dalam periode rencana strategis tahun 2019-2024 yang merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis 2019-2024, sedangkan Renja tahun 2023 berada dalam periode keempat Renstra tahun 2019-2024. Adapun Realisasi keuangan dan kegiatan tahun 2021 yang merupakan tahun kedua periode renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Realisasi Keuangan
Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.824.968.000,00	4.589.976.409,00	95,13
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.922.000,00	40.616.222,00	79,76
1	<i>Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	20.362.000,00	16.847.972,00	82,74
2	<i>Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	30.560.000,00	23.768.250,00	77,78
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.665.381.000,00	3.525.748.774,00	96,19
1	<i>Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.588.481.000,00	3.448.888.774,00	96,11

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	61.600.000,00	61.560.000,00	99,94
3	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.338.000,00	96,68
1	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	48.338.000,00	96,68
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.727.000,00	159.887.788,00	94,20
1	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.908.000,00	98,69
2	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.900.000,00	31.158.000,00	86,79
3	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.877.000,00	23.106.750,00	96,77
4	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000,00	9.360.000,00	98,53
5	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.450.000,00	89.355.038,00	95,62
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.210.000,00	223.731.500,00	90,14
1	Sub Keg Pengadaan Mebel	19.710.000,00	14.386.000,00	72,99
2	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.500.000,00	209.345.500,00	91,62
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.628.000,00	272.985.410,00	92,34
1	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	130.284.960,00	86,86
2	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.000.000,00	81.559.700,00	97,09
3	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.628.000,00	61.140.750,00	99,21
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.100.000,00	318.668.715,00	92,34
1	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.600.000,00	142.641.615,00	86,66
2	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.500.000,00	29.840.400,00	97,84
3	Sub Keg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	146.186.700,00	97,46
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.936.138.000,00	1.265.933.150,00	18,25

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.253.174.000,00	606.681.086,00	7,73
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	87.375.000,00	6.752.250,00	7,73
2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	4.560.103.000,00	361.078.723,00	7,92
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	69.173.000,00	24.869.865,00	35,95
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	442.646.000,00	129.243.246,00	29,20
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	93.877.000,00	84.737.002,00	90,26
II	Mutasi dan Promosi ASN	946.178.000,00	241.864.692,00	30,99
1	Pengelolaan Mutasi ASN	424.932.000,00	131.695.742,00	30,99
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.679.000,00	57.702.200,00	28,90
3	Pengelolaan Promosi ASN	321.567.000,00	52.466.750,00	16,32
III	Pengembangan Kompetensi ASN	340.343.000,00	161.340.590,00	55,02
1	Pengelolaan Assessment Center	243.026.000,00	133.701.341,00	55,02
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	31.103.000,00	4.835.000,00	15,55
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	38.926.000,00	11.566.749,00	29,71
4	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	27.288.000,00	11.237.500,00	41,18
IV	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	396.443.000,00	256.046.782,00	56,30
1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	106.615.000,00	60.021.632,00	56,30
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	163.792.000,00	161.913.200,00	98,85
3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	7.770.000,00	0,00	0,00
4	Pembinaan Disiplin ASN	57.877.000,00	13.132.500,00	22,69
5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	52.943.000,00	18.827.450,00	35,56
6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	7.446.000,00	2.152.000,00	28,90
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00	97,44
I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	42.125.000,00	34.720.500,00	82,42
1	Sub Keg Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6.557.000,00	3.203.000,00	48,85

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Sub Keg Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	32.385.000,00	29.102.500,00	89,86
3	Sub Keg Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3.183.000,00	2.415.000,00	75,87
II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.028.270.000,00	1.982.736.618,00	97,76
1	Sub Keg Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	9.784.000,00	8.168.000,00	83,48
2	Sub Keg Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.994.308.000,00	1.954.509.208,00	98,00
3	Sub Keg Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24.178.000,00	20.059.410,00	82,97
JUMLAH		11.984.264.000,00	9.956.896.838,00	83,08

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan tahun 2021 adalah sejumlah Rp 9.956.896.838,00 dari pagu anggaran Rp.

11.984.264.000,00 atau dengan capaian 83,08%. dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan rasionalisasi program dan kegiatan tahun 2021 yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang muncul dari pandemi ini.

Adapun evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEPEGAWAIAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKD	100 persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100 persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	5 dok.	5	5	100,00	5	5,00	100,00
		jumlah dokumen renstra/review renstra	5 dok.	5	5	100,00	5	5,00	100,00
		jumlah dokumen Renja RB	5 dok.	5	5	100,00	5	5,00	100,00
		jumlah dokumen RTP SPIP	5 dok.	5	5	100,00	5	5,00	100,00
		Jumlah dokumen RKA/DPA	5 dok.	5	5	100,00	5	5,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan kinerja	8 jenis	8	8	100,00	8	8,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan	100 persen	100	75	75,00	100	75,00	75,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	13 bln	13	13	100,00	13	13,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln	12	12	100,00	12	12,00	100,00
		jumlah pelaporan keuangan yang dibuat	15 jenis	3	3	100,00	3	3,00	20,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ASN BKD yang mengikuti pelatihan/ bimtek	100 persen	100	100	100,00	100	100,00	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek	55 ASN	55	55	100,00	55	55,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase sarana administrasi umum yang tersedia	100 persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penerangan bangunan kantor	9 jenis	9	9	100,00	9	9,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai,tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	11 bln	11	11	100,00	11	11,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan	13 jenis	13	13	100,00	13	13,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	2880 eks	2880	2880	100,00	2880	2880,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	11 bulan	11	11	100,00	11	11,00	100,00
		jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian	1 keg.	1	1	100,00	1	1,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang tersedia	100 persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	Pengadaan Mebel	almari arsip besi	1 buah	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		almari kaca arsip	1 buah	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		rak besi	7 buah	2	2	100,00	2	2,00	28,57
		kursi kerja	15 buah	4	4	100,00	4	4,00	26,67
		meja kerja	5 buah	4	4	100,00	4	4,00	80,00
		meja pelantikan	1 buah	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	16 buah	3	1	33,33	3	1,00	6,25
		CCTV	3 paket	1	1	100,00	1	1,00	33,33
		Conference cam webcam	2 buah	1	1	100,00	1	1,00	50,00
		CPU/Desktop	7 buah	1	1	100,00	1	1,00	14,29
		Handycam	2 buah	1	1	100,00	1	1,00	50,00
		Laptop	15 buah	10	10	100,00	10	10,00	66,67
		LCD projector	4 buah	3	3	100,00	3	3,00	75,00
		LED TV 55"	1 buah	1	1	100,00	1	1,00	100,00
		Mesin penghancur kertas	2 buah	2	1	50,00	2	1,00	50,00
		Perekam suara digital	5 buah	4	4	100,00	4	4,00	80,00
		Printer	10 buah	5	5	100,00	5	5,00	50,00
		screen projector	1 buah	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		Web cam	4 buah	4	4	100,00	4	4,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan yang terbayar	100 persen	100	85,00	85,00	100	85,00	85,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air	11 bulan	12	12	100,00	12	12,00	109,09
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK TIK yang dibeli	63 jenis	63	63	100,00	63	63,00	100,00
		jumlah ATK yang dibeli	9 jenis	9	9	100,00	9	9,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	gedung kantor yang bersih dan terpelihara	12 bulan	12	12	100,00	12	12,00	100,00
		jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1 paket	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persen	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) yang dipelihara	6 unit	6	6	100,00	6	6,00	100,00
		jumlah kendaraan dinas (sepeda motor) yang dipelihara	17 unit	11	11	100,00	11	11,00	64,71
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	17 unit	15	16	106,67	15	16,00	94,12
		mebeleur/filling cabinet	25 unit	25	25	100,00	25	25,00	100,00
		CPU	5 unit	15	5	33,33	15	5,00	100,00
		Laptop	5 unit	6	6	100,00	6	6,00	120,00
		LCD Projector	2 unit	3	1	33,33	3	1,00	50,00
		printer	11 unit	10	10	100,00	10	10,00	90,91
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1	1	100,00	1	1,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
		persentase jabatan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas teisi	95,50 persen	95,50	93,15	97,54	96	93,15	97,54
		persentase jabatan fungsional non guru/kesehatan terisi	2,77 persen	2,77	2,96	106,86	3	2,96	106,86
		persentase JPT Pratama, dan Administrasi yang diuji kompetensinya	13,68 persen	13,68	14,41	105,34	14	14,41	105,34
		persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	16,67 persen	16,67	16,67	100,00	17	16,67	100,00
		persentase PNS mendapatkan hukuman disiplin	0,52 persen	0,52	0,25	48,08	1	0,25	48,08
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase formasi CASN terisi	100,00 persen	100,00	0	0,00	100	0,00	0,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	jumlah dokumen rencana kebutuhan pegawai	10 dok.	10	10	100,00	10	10,00	100,00
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah CASN	550 CASN	550	0	0,00	550	0,00	0,00
		Jumlah SK CASN	550 SK	550	0	0,00	550	0,00	0,00
		jumlah CPNS diangkat menjadi PNS	250 CPNS	350	0	0,00	350	0,00	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah SK pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)	581 SK	581	632	108,78	581	632,00	108,78
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah SIM dan hardware dipelihara	20 unit	917	917	100,00	917	917,00	4585,00
		jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9700 ASN	9700	9700	100,00	9700	9700,00	100,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen kepegawaian yang dipelihara	9700 ASN	9700	9700	100,00	9700	9700,00	100,00
		KIP yang dicetak	1500 buah	1500	900	60,00	1500	900,00	60,00
		jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9700 ASN	9700	9700	100,00	9700	9700,00	100,00
	Mutasi dan Promosi ASN	persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) terisi	100,00 persen	95,5	85,45	89,48	96	85,45	85,45
	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah JPT dan Administrator yang dilantik	100 PNS	100	1158	1158,00	100	1158,00	1158,00
		jumlah PNS Mutasi antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah	45 PNS	30	33	110,00	30	33,00	73,33
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah SKKP	1750 SK	1750	1750	100,00	1750	1750,00	100,00
		jumlah SPTKGB	750 SK	750	403	53,73	750	403,00	53,73
	Pengelolaan Promosi ASN	jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP	24 PNS	24	73	304,17	24	73,00	304,17

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
		jumlah formasi JPT yang terisi	3 formasi	4	4	100,00	4	4,00	133,33
		jumlah kepala sekolah yang dilantik	100 orang	100	332	332,00	100	332,00	332,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya	29,18 persen	29,18	7,74	26,53	29	7,74	26,53
	Pengelolaan Assessment Center	jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya	300 PNS	200	197	98,50	200	197,00	65,67
		jumlah ASN yang mengikuti SAP	300 PNS	100	67	67,00	100	67,00	22,33
		jumlah peserta ujian kedinasan (UD, UKPPI)	100 PNS	100	275	275,00	100	275,00	275,00
		jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya	20 PNS	20	3	15,00	20	3,00	15,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	30 PNS	25	22	88,00	25	22,00	73,33
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	30 orang	30	32	106,67	30	32,00	106,67
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional ASN	jumlah pejabat fungsional yang dilantik/ dikukuhkan	30 PNS	200	32	16,00	200	32,00	106,67
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen	100	100	100,00	100	100,00	100,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya	22 PNS	10	10	100,00	10	10,00	45,45

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
		jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	15 PNS	10	3	30,00	10	3,00	20,00
		jumlah PTT yang diterbitkan	109 PTT	103	87	84,47	103	87,00	79,82
		jumlah fasilitasi JKK dan JKM	10 Keg	10	6	60,00	10	6,00	60,00
		jumlah rapat tim penyusun Perbup TPP/Tukin	3 Keg	3	3	100,00	3	3,00	100,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan /plakat	400 PNS	512	512	100,00	512	512,00	128,00
		jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan purna tugas	300 PNS	0	0	#DIV/0!	0	0,00	0,00
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	jumlah ASN yang mendapatkan SLKS	225 ASN	200	57	28,50	200	57,00	25,33
	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah usulan karpeg, Karis/Karsu yang terealisasi	150 kartu	300	95	31,67	300	95,00	63,33
		jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per- UU	49 unit	250	206	82,40	250	206,00	420,41
		jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49 ONS	49	39	79,59	49	39,00	79,59
		jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80 PNS	80	107	133,75	80	107,00	133,75
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah SK hukuman disiplin yang dikeluarkan	47 ASN	47	32	68,09	47	32,00	68,09

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	jumlah ijj perceraian yang diterbitkan	40 ijin	40	15	37,50	40	15,00	37,50
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
		persentase PNS mengikuti Pelatihan kepemimpinan	5,62 persen	3,62	3,21	88,67	4	3,21	57,12
		persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	100,00 persen	50,00	60,73	121,46	50	60,73	60,73
		persentase Pejabat Fungsional Non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti Pelatihan fungsional	4,34 persen	4,34	4,50	103,69	4	4,50	103,69
	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD	10,34 persen	10,34	1,38	13,35	10	1,38	13,35
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis umum (AKD)	1 dok.	3	3	100,00	3	3,00	300,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis	25 PNS	45	44	97,78	45	44,00	176,00
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat	25 PNS	45	32	71,11	45	32,00	128,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar	100 persen	50	100,00	200,00	50	100,00	100,00
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihand dasar, dan pelatihan fungsional (AKD)	1 dok.	1	1	100,00	1	1,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9 (6)	10 = (8/4)
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	13 PNS	55	57	103,64	55	57,00	438,46
		jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan	300 PNS	300	300	100,00	300	300,00	100,00
		jumlah peserta pelatihan kepemimpinan	5 PNS	5	5	100,00	5	5,00	100,00
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional	268 PNS	360	369	102,50	360	369,00	137,69

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang NSPK dan SPM dibidang kepegawaian maka kinerja pelayanan tidak dapat dianalisis berdasarkan indikator ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. BKPSDM Kabupaten Tegal pada tahun 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan sehingga hanya melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang merupakan bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun analisis terhadap pencapaian indikator sasaran BKPSDM Kabupaten Tegal berdasarkan analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tegal pada dokumen ini didasarkan pada indikator kinerja kunci (IKK) mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan melalui Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel 2.2 (Tabel T-C.30) sebagai berikut.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	tahun 2021 (n-1)	tahun 2022 (n)	tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1) disamakan target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator dan Target Renstra 2019-2024 (setelah perubahan)												IKK terdapat pada perubahan renstra BKPSDM 2019-2024
1	Indeks Sistem Merit					0,70	0,75	0,54	0,64	0,70	0,75	
2	Indeks kepuasan masyarakat					83,50	84,83	76,90	82,60	82,50	83,50	
3	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi					44,17	47,09	38,08	51,50	44,17	47,09	
4	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi					74,91	77,81	75,34	83,14	74,91	77,81	

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kab. Tegal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra Tahun 2019-2024 (setelah perubahan)

Tujuan “Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan kualitas kinerja aparatur sipil negara” dengan sasaran yaitu :

a. Sasaran “ Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dan penataan pegawai memiliki 2 (dua) indikator kinerja :

- Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 82,60 dari target 82,25%;
- Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pada tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 51,50%

b. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja ASN” yang memiliki satu indikator yaitu “Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi” dimana pada tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 83,14%;

c. Sasaran Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan yang memiliki satu indikator yaitu “Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah” dimana pada tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 100%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tegal dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai kepada seluruh pegawai guna mendapatkan pengembangan kompetensi yang menunjang tugas pokok dan fungsinya. Hal ini karena kompetensi aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu unsur utama dalam tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
2. Dampak pandemi covid-19 turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selain masih rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

3. Kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional perlu didukung dengan peningkatan kompetensi dan prestasi.
4. Sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka CPNS formasi 2021 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pelatihan dasar pada tahun 2023;

Adapun solusi atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Peningkatan kompetensi PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan dengan metode non klasikal;
2. Mendorong peningkatan kualitas dan implementasi roadmap sistem merit dalam manajemen ASN;
3. Perubahan *mindset* bahwa jabatan fungsional bukanlah jabatan alternatif, penyetaraan jabatan fungsional tidak menunggu rekomendasi instansi Pembina jabatan fungsional, namun pengalihannya kedalam jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang sebelumnya diduduki.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2.4. Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun review terhadap RKPD sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3 (Tabel T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tegal Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEPEGAWAIAN				13.699.287.000	KEPEGAWAIAN				7.614.685.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100,00 persen	7.244.787.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100,00 persen	4.458.685.500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100,00 persen	70.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100,00 persen	65.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan	100 persen	4.721.590.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan	100,00 persen	3.464.406.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 orang/ bulan	4.645.530.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 orang/ bulan	3.395.406.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok.	76.060.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok.	69.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 persen	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek	20,00 persen	55.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng, DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 ASN	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng, DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 ASN	55.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase sarana administrasi umum yang tersedia	100 persen	257.856.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase sarana administrasi umum yang tersedia	100,00 persen	228.700.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah penerangan bangunan kantor	10 jenis paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tegal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	64.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tegal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	53.700.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tegal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	35.856.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tegal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tegal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tegal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	17.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok.	12.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok.	10.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	115.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	105.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase barang milik daerah yang tersedia	87,5 persen	1.398.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase barang milik daerah yang tersedia	87,50 persen	27.505.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00 unit	--	
	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	15.500.000	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00 paket	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	133.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2,00 unit	22.505.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	750.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00 unit	--	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase jasa penunjang urusan yang terbayar	100 persen	285.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase jasa penunjang urusan yang terbayar	100,00 persen	273.074.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153.074.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase barang milik daerah yang dipelihara	87,5 persen	436.841.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase barang milik daerah yang dipelihara	87,50 persen	345.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tegal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	176.841.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tegal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	175.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tegal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tegal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	125.000.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan		6.454.500.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan		3.156.000.000	
			Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 persen	-			Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	0,11 persen		
			Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya	95,42 persen	-			Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya	95,42 persen		
			Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	44,85 persen	-			Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	44,85 persen		
			Rasio pegawai fungsional (%)	288,1 persen	-			Rasio pegawai fungsional (%)	288,10 persen		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	15,68 persen	-			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	15,68 persen		

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		persentase formasi CASN terisi	100 persen	4.985.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		persentase formasi CASN terisi	100,00 persen	1.856.000.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dok.	50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dok.	35.000.000	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	4.000.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1.491.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 dok.	85.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	674 dok.	55.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dok.	700.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dok.	200.000.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok.	150.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok.	75.000.000	
	Mutasi dan Promosi ASN		persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang terisi	98,15 persen	620.000.000	Mutasi dan Promosi ASN		persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang terisi	98,15 persen	590.000.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 dok.	55.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 dok.	50.000.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dok.	90.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dok.	90.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Promosi ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 dok.	475.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jateng, DIY, DKI	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 dok.	450.000.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya	40,21 persen	432.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya	40,21 persen	350.000.000	
	Pengelolaan Assessment Center	Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 dok.	300.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 dok.	175.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	650 org	45.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	250 org	55.000.000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	30 orang	-	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	30 orang	30.000.000	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 dok.	25.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 dok.	25.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jateng, DKI	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 orang	62.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jateng, DKI	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 orang	65.000.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 persen	417.500.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100,00 persen	360.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok.	75.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok.	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8500 dok.	10.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8500 dok.	10.000.000	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan	25.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan	15.000.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	442 orang	180.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	442 orang	200.000.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 orang	7.500.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 orang	5.000.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 orang	75.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab.Tegal	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 orang	50.000.000	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab.Tegal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43 Laporan	35.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab.Tegal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43 Laporan	25.000.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 dok.	10.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 dok.	5.000.000	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.360.146.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.345.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun		3.360.146.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun		2.345.000.000	
			Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	80 persen				Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	75,01 persen		

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM	50 persen				persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM	45,01 persen		
	Pengembangan Kompetensi Teknis		persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM	7,76 persen	245.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM	3,41 persen	130.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 dok.	10.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 dok.	5.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	43 orang	225.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	43 orang	120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan PengembanganKompetensi	1 dok.	10.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan PengembanganKompetensi	1 dok.	5.000.000	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar	100 persen	3.115.146.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar	100,00 persen	2.215.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3 dok.	10.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3 dok.	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan	target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	3.086.646.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jateng, DIY	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2.200.000.000	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 dok.	18.500.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab.Tegal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 dok.	10.000.000	
					7.059.433.000					9.959.685.500	

Hasil analisis kebutuhan Renja BKPSDM Kabupaten Tegal tahun 2023 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renstra tahun 2019-2024 pada tahun keempat renstra agar tercapai target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pagu anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program adalah sejumlah Rp. 9.959.685.500,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah dilakukan).

BKPSDM Kabupaten Tegal sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tidak melayani masyarakat umum secara langsung, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM adalah merupakan kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia mendukung kebijakan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tegal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BKPSDM KABUPATEN TEGAL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, salah satunya adalah melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Adanya pergeseran paradigma dalam mengelola kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, administrasi pembangunan, agenda pembangunan dan pelayanan publik yang inovatif menuntut hadirnya aparatur sipil negara yang professional, berintegritas, netral, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta didukung birokrasi yang lebih sederhana dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan.

Agenda ketujuh RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Setiap organisasi birokrasi dituntut memiliki akuntabilitas kinerja yang baik secara internal maupun kepada publik. Kondisi akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah saat ini masih sebatas pada pemenuhan pelaporan sehingga masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Akuntabilitas belum merepresentasikan kinerja riil institusi birokrasi pemerintah dengan baik dan efektif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal,

dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang handal sebagai suatu bagian prasyarat untuk menuju *dynamic government*.

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi dibidang kepegawaian untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur. Sebagai instansi yang bertugas mengelola SDM aparatur di Kabupaten Tegal, BKPSDM Kabupaten Tegal berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan program nasional tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dituju melalui rencana kerja sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam perubahan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan kualitas kinerja aparatur sipil negara dengan indikator indeks sistem merit.

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan penataan pegawai, dengan indikator “Indeks kepuasan masyarakat dan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi”;
2. Meningkatnya kualitas kinerja ASN, dengan indikator persentase ASN yang telah memenuhi syarat kompetensi;
3. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah dengan indikator “Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah”;

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah untuk mewujudkan ASN Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugas-tugas yang diembannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kab. Tegal Tahun 2022 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan kualitas kinerja aparatur sipil negara		Indeks Sistem Merit	Indeks, tahunan	-	0,70	0,75	0,80
	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan penataan pegawai	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai, tahunan	82.87	83,50	84.83	86.20
		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	persen, tahunan	40.65	44,17	47,09	50,01
	Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	persen, tahunan	70.81	74,91	77,81	80,72
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	persen, tahunan	90,00	100,00	100,00	100,00

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta target kinerja BKKPSDM yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2019-2024. Selain itu juga dalam rangka merealisasikan indikator kinerja BKPSDM sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu terkait dengan pencapaian misi pertama **"mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat"**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
- 1) Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 2) Mutasi Dan Promosi ASN
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - 4) Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - f. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Asn
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - h. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- c. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Pencapaian indikator program tersebut dilakukan dengan melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Adapun sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dikelola yaitu dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, maka lokasi kegiatan sebagian besar berada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, BKN kantor Regional Yogyakarta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BKPSDM tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana kerja juga merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, *pertama*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tegal sebagai pengelola kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. *Kedua*, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. *Ketiga*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. *Keempat*, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Rencana kerja BKPSDM tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang akan dituju dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan BKPSDM Kabupaten Tegal tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tegal**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	03	KEPEGAWAIAN			7.614.685.500				13.590.879.000				
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100,00 persen	4.458.685.500		100,00 persen	7.265.879.000				
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100,00 persen	65.000.000		100,00 persen	80.000.000			
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab.Tegal	3 dok.	25.000.000	DAU		3 dok.	35.000.000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	8 Laporan	40.000.000	DAU		8 Laporan	45.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan		100,00 persen	3.464.406.000			100,00 persen	5.082.879.000
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	812 Orang /bulan	3.395.406.000	DAU		812 Orang /bulan	5.002.879.000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab.Tegal	3 dok.	69.000.000	DAU		3 dok.	80.000.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek		100,00 persen	55.000.000			100,00 persen	75.000.000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jateng, DIY	58 orang	55.000.000	DAU		58 orang	75.000.000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase sarana administrasi umum yang tersedia		100,00 persen	228.700.000			100,00 persen	267.500.000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	1 paket	7.000.000	DAU		1 paket	12.500.000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tegal	2 paket	53.700.000	DAU		2 paket	65.000.000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tegal	3 paket	35.000.000	DAU		3 paket	37.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tegal	2 paket	17.500.000	DAU		2 paket	20.000.000
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	10.500.000	DAU		1 dok.	12.500.000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jateng, DIY, DKI	24 Laporan	105.000.000	DAU		24 Laporan	120.000.000
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang tersedia		87,50 persen	27.505.000			90,00 persen	1.115.500.000
5 03 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	PNS Kab. Tegal	0,00 unit	-			5,00 unit	350.000.000
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	15.500.000
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	2 unit	22.505.000	DAU		9 unit	50.000.000
5 03 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	0 unit	-	DAU		0 unit	700.000.000
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan yang terbayar		100,00 persen	273.074.500			100,00 persen	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	12 Laporan	153.074.500	DAU		12 Laporan	175.000.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab.Tegal	1 Laporan	120.000.000	DAU		1 Laporan	125.000.000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara		87,50 persen	345.000.000			90,00 persen	345.000.000
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab.Tegal	17 unit	175.000.000	DAU		17 unit	180.000.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Tegal	58 unit	45.000.000	DAU		58 unit	65.000.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BKPSDM Kab.Tegal	1 unit	125.000.000	DAU		1 unit	100.000.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.156.000.000				6.325.000.000
						Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan		0,11 persen				0,11 persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya		95,42 persen				96,08 persen					
		Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya		44,85 persen				47,88 persen					
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)		288,10 persen				318,87 persen					
		Rasio pegawai fungsional (%)		15,68 persen				16,23 persen					
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan		92,69 persen				93,05 persen					
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase formasi CASN terisi		100,00 persen	1.856.000.000			100,00 persen	4.740.000.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	35.000.000	DAU		1 dok.	55.000.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jateng, DIY, DKI	1 Laporan	1.491.000.000	DAU		600 CASN	4.100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jateng, DIY, DKI	674 dok.	55.000.000	DAU		663 dok.	85.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jateng, DIY, DKI	3 dok.	200.000.000	DAU		3 dok.	350.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	75.000.000	DAU		1 dok.	150.000.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang terisi		98,15 persen	590.000.000			98,50 persen	660.000.000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jateng, DIY, DKI	5 dok.	50.000.000	DAU		5 dok.	60.000.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jateng, DIY, DKI	1.500 dok.	90.000.000	DAU		1.500 dok.	100.000.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jateng, DIY, DKI	5 dok.	450.000.000	DAU		5 dok.	500.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya		40,21 persen	350.000.000			46,12 persen	495.000.000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab.Tegal	2 dok.	175.000.000	DAU		2 dok.	325.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jateng, DIY	250 org	55.000.000	DAU		250 org	45.000.000
5	03	02	2.03	12	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	BKPSDM Kab.Tegal	30 orang	30.000.000	DAU		30 orang	30.000.000
5	03	02	2.03	13	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	25.000.000	DAU		1 dok.	30.000.000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jateng, DKI	35 orang	65.000.000	DAU		30 orang	65.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		100,00 persen	360.000.000			100,00 persen	430.000.000
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	50.000.000	DAU		1 dok.	75.000.000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	8500 dok.	10.000.000	DAU		8500 dok.	15.000.000
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab.Tegal	3 Laporan	15.000.000	DAU		3 Laporan	25.000.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kab.Tegal	442 orang	200.000.000	DAU		663 orang	185.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM Kab.Tegal	100 orang	5.000.000	DAU		100 orang	10.000.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab.Tegal	150 orang	50.000.000	DAU		150 orang	75.000.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	ASN Kab.Tegal	43 Laporan	25.000.000	DAU		43 Laporan	35.000.000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab.Tegal	40 dok.	5.000.000	DAU		40 dok.	10.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.345.000.000				2.810.000.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.345.000.000				2.810.000.000
						Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun		75,01 persen				80,00 persen	
						Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan		45,01 persen				50,00 persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM		3,41 persen	130.000.000			7,76 persen	275.000.000
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	5.000.000	DAU		1 dok.	15.000.000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jateng, DIY	43 orang	120.000.000	DAU		50 orang	250.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabata Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Uruasn Pemerintahan Umum.	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	5.000.000	DAU		1 dok.	10.000.000
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar		100,00 persen	2.215.000.000			100,00 persen	2.535.000.000
5 04 02 2.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang disusun.	BKPSDM Kab.Tegal	3 dok.	5.000.000	DAU		3 dok.	15.000.000
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan	Jateng, DIY	1 Laporan	2.200.000.000	DAU		1 Laporan	2.500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan										
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab.Tegal	1 dok.	10.000.000	DAU		1 dok.	20.000.000
									9.959.685.500				16.400.879.000

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Program BKPSDM Kabupaten Tegal merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM. Rencana program prioritas beserta indikator program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal.

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan tahunan yang memuat berbagai kegiatan tahun anggaran 2023 dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Program dan kegiatan dirumuskan secara konkrit, disertai dengan rencana capaian program dan kegiatan yang memuat indikator *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur sehingga pencapaian tujuan dan sasaran akan dapat berjalan secara efektif.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Harapan kami Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas bagi segenap ASN pada BKPSDM Kabupaten Tegal. Dengan mempedomani Renja, akan dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Slawi, Agustus 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tegal



MUJAHIDIN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19690619 199003 1 003

LAMPIRAN

LAMPIRAN : RANCANGAN RENCANA KERJA
BKPSDM KAB. TEGAL TAHUN 2023

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1.	Distribusi pegawai belum optimal karena formasi kebutuhan dan keterisian pegawai belum berdasarkan anjab dan ABK	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
2.	<ul style="list-style-type: none">- Berkurangnya ASN karena pensiun atau mutasi keluar daerah- seleksi dilakukan di Semarang, butuh anggaran yang besar- nilai manfaat/nilai ekonomi untuk masyarakat Kab.Tegal sedikit- pengadaan ASN Prakom yang menguasai programing belum dilakukan test praktek dalam SKB	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
3.	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian SK pensiun tepat waktu, tepat data dan tepat bayar harus dipertahankan- Penerimaan berkas pensiun masih manual- Pada saat pensiun, KTP dan KK masih PN	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
4.	<ul style="list-style-type: none">- SIM layanan kepegawaian belum terintegrasi 2 (dua) arah- belum ada tenaga ahli untuk membangun dan memelihara aplikasi layanan kepegawaian	Pengelolaan system informasi kepegawaian

NO	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
5.	Arsip kepegawaian berbentuk dokumen dan <i>softcopy</i> perlu dikelola dengan baik	Pengelolaan data kepegawaian
6.	<ul style="list-style-type: none"> - ASN yang mengajukan mutasi masuk maupun mutasi keluar perlu difasilitasi hak-hak kepegawaiannya - PNS mutase masuk belum dilakukan uji kompetensi 	Pengelolaan mutasi ASN
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat PNS yang menerima SK KP tidak tepat waktu sehingga tidak tepat bayar - Usul kenaikan pangkat dengan <i>paperless</i> belum optimal 	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
8.	<ul style="list-style-type: none"> - formasi JPT pratama, administrator dan pengawas perlu segera diisi - Sudah ditetapkan peraturan bupati tentang pola karir pegawai namun belum diimplementasikan 	Pengelolaan promosi ASN
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki dokumen kesenjangan kompetensi - terdapat pegawai yang belum dilakukan uji kompetensi 	Pengelolaan assessment center
10.	Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui jalur Pendidikan formal	Pengelolaan Pendidikan lanjutan
11.	pembinaan jabatan fungsional belum optimal	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
12.	tidak ada sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
13.	Tim Penilai AK belum seluruhnya dibentuk untuk setiap jenis jabatan fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terakomodirnya pemberian TPP bagi PPPK - belum terimplementasikannya Permenpan RB No 6 Tahun 2022 	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

NO	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
15.	PD belum melakukan pendokumentasian pemantauan, pembinaan kinerja ASN	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
16.	belum ada evaluasi kinerja PPPK	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
17.	Belum ada pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (PP 11/2017)	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
18.	penghargaan dari Presiden yaitu SLKS harus diseleksi dan diusulkan	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
19.	adanya regulasi baru (PP 94 tahun 2021)	Pembinaan Disiplin ASN
20.	masih adanya pelanggaran kedisiplinan oleh ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
21.	masih adanya ASN yang melakukan perceraian tidak menempuh prosedur ijin cerai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
22.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kompetensi pegawai belum berdasarkan hasil kesenjangan kompetensi, namun masih berdasarkan kebutuhan dari instansi penyelenggara - kebutuhan pelatihan teknis bagi ASN harus disusun 	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
23.	Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelatihan minimal 20 jp dalam setahun kepada ASN	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
24.	alumni peserta pelatihan harus dipantau	Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

NO	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
		Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
25.	kebutuhan pelatihan manajerial bagi ASN harus disusun dan latsar untuk CPNS harus disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertifikasi Jabatan Fungsional
26.	kewajiban Pemda untuk memberikan latsar CPNS	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
27.	alumni peserta pelatihan harus dipantau	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah diverifikasi dan berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 163);

30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;

- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Perikanan;
- v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat;
- dd. Kecamatan Adiwerna;
- ee. Kecamatan Balapulang;
- ff. Kecamatan Bojong;
- gg. Kecamatan Bumijawa;
- hh. Kecamatan Dukuhturi;
- ii. Kecamatan Dukuhwaru;
- jj. Kecamatan Jatinegara;
- kk. Kecamatan Kedungbanteng;
- ll. Kecamatan Kramat;
- mm. Kecamatan Lebaksiu;
- nn. Kecamatan Margasari;
- oo. Kecamatan Pagerbarang;
- pp. Kecamatan Pangkah;
- qq. Kecamatan Slawi;
- rr. Kecamatan Suradadi;
- ss. Kecamatan Tarub;
- tt. Kecamatan Talang;
- uu. Kecamatan Warureja; dan
- vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

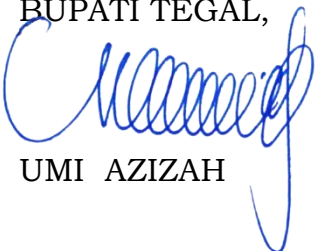
(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 77